

Jubir Wapres Sebut Dana Haji Diinvestasikan secara Aman

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi meminta masyarakat tidak khawatir dengan dana haji mereka. Ia memastikan dana haji masyarakat tetap aman walaupun pemberangkatan ibadah haji 2021 batal.

"Tidak perlu khawatir, karena itu (dana haji disimpan) aman," kata Masduki kepada wartawan, Senin (7/6).

Masduki mengatakan, meski tidak digunakan, dana haji tersebut justru semakin berkembang. Sebab, dana tersebut diinvestasikan secara syariah di sukuk pemerintah yang halal.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah mensubsidi biaya haji. Misalnya, jemaah membayar Rp 35 juta untuk berangkat haji. Namun, pada dasarnya total ongkos yang dibayarkan pemerintah untuk seluruh proses pemberangkatan, mulai dari transportasi, yakni sekitar Rp 70 juta.

"Berarti harus ada dana sepele yang disubsidi pemerintah kepada setiap jemaah haji yang berangkat. Nah separuhnya itu, kata Pak Anggito (Kepala BPKH) diinvestasikan ke wilayah yang aman. Bukan langsung dana investasi itu digunakan ke infrastruktur," kata Masduki.

Pernyataan Masduki tersebut juga sekaligus membantah informasi tentang

dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur. Klifikasi tersebut merespons beredar video wawancara Wapres Ma'ruf Amin ketika membicarakan soal dana haji yang diinvestasikan.

Masduki memastikan video itu merupakan potongan video ketika Ma'ruf belum menjadi Wapres dan sedang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Video tersebut beredar di kalangan masyarakat dan bertepatan dengan momentum saat pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji tahun ini.

"Ketika memberikan pernyataan terkait dana haji yang diinvestasikan, itu waktu sebelum jadi Wapres, waktu masih jadi Ketua MUI. Beliau diwawancara, bagaimana kalau dana haji diinvestasikan ke infrastruktur?" kata Masduki.

"Maka beliau memberikan pernyataan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pasti akan mengamankan dana haji itu ke wilayah-wilayah yang aman," lanjut Masduki.

Ia mengatakan, salah satu wilayah aman yang dimaksud Wapres Ma'ruf biasanya dalam bentuk sukuk pemerintah. Jika ditaruh di sukuk pemerintah, kata dia, maka keamanan dana haji tersebut terjamin bahkan mendapatkan imbal hasil atau bagian yang lebih tinggi. ■ han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER KOMISI I DPR DENGAN MENKOMINFO

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Kemkominfo Tahun 2022.

Kekuatan TNI dan Polri Dilipatgandakan Tangani Covid-19 di Kudus dan Bangkalan

Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap 'ngerinya' penularan virus korona di Kudus dan Bangkalan. Kedua daerah tersebut saat ini mengalami lonjakan Covid-19.

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya bersama Polri melipatgandakan kekuatan untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah, dan Bangkalan, Jawa Timur.

Hadi mengakui saat ini daerah Kudus dan Bangkalan tengah menjadi sorotan lantaran mengalami lonjakan kasus korona. Karena itulah TNI dan Polri melakukan pendampingan disertai kekuatan agar kasus di sana bisa terkendali

dengan membantu penerapan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

"TNI dan Polri serta BNPB telah melakukan langkah dalam rangka pengendalian kasus di dua wilayah tersebut dengan cara melakukan pendampingan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten untuk menggerakkan motor PPKM yang ada di bawah," kata Hadi usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin

(7/6). Hadi menjelaskan, PPKM skala mikro adalah salah satu kunci untuk menekan angka kasus positif korona. PPKM adalah program yang berada di hulu yang berefek besar pada pengurangan beban rumah sakit yang ada di hilir.

"Karena di PPKM kita bisa melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan setelah itu kita bisa mengetahui apakah positif ataupun tidak termasuk di PPKM kita juga bisa meningkatkan angka kesembuhan masyarakat dan menekan angka kematian," ujar Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

"Sehingga pendampingan yang kita lakukan di PPKM mikro untuk membantu kepala dinas kesehatan kabu-

paten adalah melipatgandakan kekuatan tracer untuk membantu Babinsa dan Babinkamtibmas," tambah Hadi.

Hadi menjelaskan bahwa kekuatan petugas untuk melakukan tracing diperlukan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Ia berharap pelaksanaan tracing yang diikuti dengan testing ini jumlahnya bisa tetap dipertahankan dengan baik.

TNI-Polri, lanjut Hadi, juga melakukan pendampingan terkait dengan rumah sakit rujukan Covid-19. Kedua instansi tersebut juga mengerahkan tenaga kesehatan di rumah sakit yang membutuhkan sehingga tingkat keterisian di sana bisa ditekankan.

"Termasuk juga apakah tenaga kesehatan di masing-masing rumah sakit di setiap kabupaten kurang, akan kita tambah dan juga membantu di tempat-tempat isolasi yang dibangun oleh kabupaten maupun kota madya," ungkap Hadi.

Mengerikan

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan 'ngerinya' penularan virus korona di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kedua daerah tersebut saat ini tengah mengalami lonjakan Covid-19.

Keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit di kedua

daerah tersebut mengalami lonjakan drastis.

"Kudus yang sebelumnya rumah sakitnya hanya terisi sekitar 40-an, kemudian dalam 1,5 minggu terakhir naik cukup tinggi sampai sekitar 350-an. Demikian juga di Bangkalan yang tadinya tempat tidur isolasinya pasien sekitar 10-an, sekarang dalam 1,5 minggu naik ke angka 70 sampai 80-an," kata Budi usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/6).

Kenaikan kasus corona di Kudus disebabkan oleh aktivitas ziarah. Sedangkan di Bangkalan disebabkan oleh banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Tanah Air.

Pemerintah pusat pun sudah turun tangan ke daerah tersebut. Ia menginstruksikan agar pasien bergejala berat dan sedang di dua daerah itu dirujuk ke rumah sakit yang berada di daerah sekitar. Tujuannya untuk mengurangi beban rumah sakit yang ada di Kudus dan Bangkalan.

"Kita mengurangi tekanan beban yang ada di rumah sakit dengan cara kita merujuk pasien-pasien yang berat dan sedang ke kota terdekat untuk Kudus ke Semarang, untuk Bangkalan ke Surabaya, dan Alhamdulillah kapasitas rumah sakit di Semarang dan kapasitas RS di Surabaya itu cukup," tandasnya. ■ han

Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK terkait Polemik Tes Wawasan Kebangsaan

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melayangkan surat pemanggilan terhadap pimpinan KPK terkait permintaan klarifikasi soal polemik tes Wawasan kebangsaan (IWK).

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pemanggilan direncanakan pada hari ini, Selasa (8/6). "Sudah, sudah dilayangkan surat pemanggilan. Kita harapkan besok sih. Undangan kita kepada pimpinan KPK itu besar," ungkap Anam di Jakarta, Senin (7/6).

Dia pun berharap para pimpinan KPK dapat kooperatif menghadiri permintaan keterangan dari Komnas HAM.

Hal itu dikarenakan, para pegawai KPK, baik yang lolos TWK dan yang tidak lolos sudah diminta keterangannya.

"Supaya seimbang pimpinan KPK harus memberikan keterangan sebaliknya, versi mereka itu seperti apa," tuturnya.

Dia menjelaskan, setelah pimpinan KPK, pada hari Rabu (9/6), pihaknya juga telah mengagendakan pemeriksaan kepada Kepala BKN Bima Haria Wibisona. Menurut dia, lembaga lain yang berkaitan dengan TWK seperti BNPT akan menyusul.

"Kita juga mengundang kepala BKN untuk hari Rabu. Nanti menyusul lah yang lain-lain," tandasnya. ■ han



IDN/ANTARA

RAKER KOMISI II DPR DENGAN MENTERI ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djailil (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pemeliharaan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Pantau Seluruh Siaran Televisi, KPI Bakal Gunakan Artificial Intelligence

JAKARTA (IM) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk memantau semua siaran televisi. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Supriyo mengatakan, penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) diperlukan karena siaran televisi semakin banyak.

"Jadi ke depan, kami berencana menggunakan pengawasan melalui AI. Selama ini, kami mengawasi satu televisi dengan empat orang pemantau. Sifnya enam jam, 24 jam kami pantau," kata Agung dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (7/6).

Kendati demikian, Agung tak menjabarkan seperti apa teknis atau mekanisme pemantauan dengan menggunakan teknologi AI.

Cuman menurut Agung, pihaknya berkecukupan pada kasus lolosnya tayangan sinetron, di mana ada artis di bawah umur memainkan peran istri ketiga.

Lolosnya tayangan sinetron dari pantauan KPI akibat dari semakin banyaknya televisi, tetapi jumlah petugas pemantau tak sebanding. Ia mengandaikan, apabila acara televisi semakin banyak,

maka tidak akan efektif dengan jumlah personel pemantau yang dimiliki KPI.

"Misalnya, Indosiar yang belakangan viral. Itu diawasi oleh empat pemantau kami. Nah, ke depan kalau jumlah televisi semakin banyak, maka tidak efisien jika kami menggunakan satu televisi dengan empat pemantau," jelasnya.

Agung mengandaikan, apabila nantinya ada 20 stasiun televisi, maka KPI memerlukan 80 orang pemantau. Sehingga, menurutnya, akan lebih efektif apabila pemantauan televisi dilakukan dengan menggunakan teknologi AI.

"Artificial Intelligence untuk memantau semua tayangan televisi," tuturnya.

Munculnya wacana menggunakan teknologi AI untuk memantau televisi mengemuka usai Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menghentikan siaran TV Analog atau Analog Switch Off (ASO) secara bertahap.

Tahap pertama penghentian siaran analog paling lambat dilakukan pada 17 Agustus 2021. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. ■ mei

Tjahjo Kumolo Belum Tahu Nama Wamenpan-RB

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.47/2021 tentang Kementerian Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Di dalam perpres tersebut diatur terkait posisi Wakil Menteri PANRB (Wamenpan-RB).

Menteri PANRB (MenPANRB) Tjahjo kumolo mengaku belum tahu siapa yang akan menduduki posisi Wamenpan-RB tersebut.

"Belum ada info-info," katanya saat dihubungi, Senin (7/6).

Dia menyerahkan sepenuhnya siapapun yang

menduduki jabatan Wamenpan-RB kepada Presiden Jokowi. "Terkait siapa yang nanti akan ditugaskan bapak presiden sebagai wamen, saya Sebagai MenPANRB siap saja menerima penugasan Wamen-PANRB oleh bapak presiden. Hal itu semata-mata penguatan tugas KemenPANRB," ujarnya.

Ditanyakan apakah sudah ada komunikasi dengan presiden terkait pengisian posisi Wamen tersebut, Tjahjo hanya menjawab dirinya siap menerima arahan. "Posisi saya tidak pada komunikasi. (Posisi saya) siap menerima tugas dan arahan bapak presiden," ujarnya. ■ mei

KPK Dalam Aliran Uang Suap Gubernur Sulsel Nonaktif

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya aliran duit yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah dari beberapa pihak. Di antaranya dari pengerjaan proyek yang selama ini dikerjakan.

Informasi aliran uang 'haram' yang diterima Nurdin Abdullah, penyidik KPK dalam dari seorang wiraswasta Haeruddin yang diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurdin Abdullah (NA).

"H. Haeruddin, SE (Wiraswasta), didalam pengetahuan saya antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka NA dari beberapa pihak yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (7/6).

Selain memeriksa Haeruddin, penyidik KPK juga memeriksa seorang PNS bernama Tasryif Hakim. Tasryif dikonfirmasi terkait dengan penerimaan penghasilan resmi tersangka Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel.

Dua saksi lain yang sejatinya diperiksa pada Senin (7/6), tidak hadir. Seorang dosen bernama Muhammad Nusran minta dilakukan penjadwalan

pemanggilan ulang pada Rabu (9/6). "Sedangkan saksi satunya lagi, Nurwadi Bin Pakki (Wiraswasta), tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi. KPK menghimbau untuk kooperatif hadir pada pemanggilan selanjutnya," ungkap Ali.

Sebelumnya, Jumat (4/6) bertempat di gedung Merah Putih KPK juga telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, yakni dua orang dari pihak swasta. Mereka Eka Safitri dan Virna Ria Zalda.

"Para saksi masih didalam pengetahuannya terkait dugaan aliran sejumlah dana dari tersangka NA kepada pihak-pihak tertentu," kata Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Keduanya yakni, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER), selaku pihak yang diduga sebagai perantara suap sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah dan seorang kontraktor, Agung Sucipto (AS) selaku pemberi

suap. Nurdin diduga menerima suap Rp2 miliar dari Agung Sucipto melalui perantara Edy Rahmat. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu diduga terkait keberlanjutan proyek wisata yang akan dikerjakan oleh Agung Sucipto di Bulukumba.

Selain suap dari Agung Sucipto, KPK menduga Nurdin juga menerima uang atau gratifikasi dari kontraktor lainnya. Nurdin diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya sebesar Rp3,4 miliar yang berkaitan proyek di Sulsel.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ■ han

IDN/ANTARA



KPK BERIKAN PENGAWASAN DI INDUSTRI GALIAN C PAPUA BARAT

Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria (ketiga kanan) berbincang dengan pengelola Galian C (kedua kanan) saat melakukan pengawasan beberapa bidang usaha tambang di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (7/6). KPK bersama kementerian terkait melakukan kunjungan ke Kota Sorong untuk meninjau secara langsung industri galian C yang diduga terjadi kebocoran keuangan daerah.

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk
("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari Kamis, 15 Juli 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang terdapat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 22 Juni 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Pemegang Saham dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika diusulkan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Usulan mata acara Rapat dilakukan secara tertulis dengan memberikan alasan serta menyertakan bahan terkait dan disampaikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Merujuk pada Surat OJK No. S-92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Peraturan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang akan disediakan oleh KSEI. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 8 Juni 2021 melalui situs web e-RUPS yang disediakan oleh KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.tamarin.co.id).

Jakarta, 08 Juni 2021
Direksi Perseroan